



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

Edisi Selasa, 24 Juni 2025



RINGKASAN BERITA HARI INI

Sidoarjo

Jawa Pos METROPOLIS • SELASA 24 JUNI TAHUN 2025 | HALAMAN 18

Bupati Lepas 405 Atlet ke Porprov IX Jatim ke Porprov IX Jatim

Bonus Pemenang Naik Jadi Rp 50 Jutaan

SIDOARJO - Bupati Sidoarjo Subandi memberangkatkan 405 atlet dari total 1.286 atlet yang akan berlaga di Porprov IX Jatim di Malang dari Pendopo Delta Wibawa kemarin (23/6). Subandi minta atlet berjuang penuh untuk target 600 poin.

"Sidoarjo saat ini sudah mencapai 12 medali emas. Mudah-mudahan ini jadi pemantik semangat atlet-atlet lain," katanya. Subandi mengatakan, akan ada peningkatan bonus dibanding tahun lalu atlet. "Bonusnya kita naikan dari tahun lalu yang Rp 40 juta. Bisa nanti Rp 50 juta atau bahkan lebih, nanti kita umumkan. Intinya, kami ingin atlet termotivasi dan tidak kalah dari daerah lain," paparnya. Subandi mengatakan, bonus dan anggaran pembinaan sejalan dengan kondisi masyarakat Sidoarjo dalam membangun



WAKILI SIDOARJO: Bupati Sidoarjo Subandi mengenakan jaket ke atlet yang akan berlaga dalam Porprov IX Jatim di Pendopo Delta Wibawa kemarin (23/6). Atlet-atlet yang sehat dan siap bertanding, Subandi optimistis target tahun ini 800 poin. Mudah-mudahan bisa tercapai," ujarnya. (eza/uzi)

BHS: Bandara Juanda Berpotensi Jadi Magnet Wisatawan Mancanegara



MENYAPA: Anggota DPR RI Bambang Haryo Soekartono saat meninjau Bandara Juanda, Sidoarjo, Senin (23/6).

SEDATI-Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono (BHS), menilai Bandara Internasional Juanda memiliki potensi besar sebagai pintu gerbang utama masuknya wisatawan mancanegara ke Jawa Timur. Dalam kunjungan kerjanya ke Terminal 1 Juanda, Senin (23/6), ia menyoroti pentingnya pengembangan infrastruktur dan peningkatan pelayanan bandara untuk menunjang sektor pariwisata. "Saya ingin memastikan kesiapan infrastruktur, karena ini adalah fasilitas vital untuk kelancaran transportasi udara, khususnya di wilayah Surabaya dan Jawa Timur," ujar BHS di lokasi. Ia menilai kapasitas terminal domestik Juanda sudah memadai, namun menekankan perlunya perhatian khusus terhadap terminal internasional. **Ke Halaman 10**

Hampir Semua Calon Murid Pilih SMP Negeri Dibanding Swasta

Pada SPMB Jalur Domisili

SIDOARJO - Pendaftaran Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tingkat SMP jalur domisili tuntas pada Sabtu (21/6). Kemarin (21/6) dan hari ini (24/6), pendaftar diverifikasi. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) mencatat hampir semua calon siswa lebih memilih SMP negeri dibanding SMP swasta.



SPMB SMP JALUR DOMISILI

- Ada tujuh SMP swasta yang bisa dipilih.
 - Banyak siswa lebih memilih SMP negeri dibanding swasta.
 - Dinas Dikbud terima dan seleksikan kelulusan. Mulai pertanyaan terkait skor jarak dan permasalahan login website pendaftaran.
- Sumber: Dinas Dikbud Sidoarjo

Menurut Netti, pihaknya akan melihat lebih lanjut perkembangan tersebut saat pengumuman hasil seleksi nanti. "Kami menerima sejumlah aduan, tapi bisa langsung diatasi," ujarnya. (eza/uzi)

Kamis (26/6) mendatang. Saat ini, proses SPMB masih tahap verifikasi data dan verifikasi lapangan. Tahapan ini berlangsung selama dua hari untuk memastikan data pendaftaran sesuai dengan persyaratan. "Tahap verifikasi ini penting untuk memastikan keabsahan data, termasuk terkait domisili," jelasnya. "Kami menerima sejumlah aduan, tapi bisa langsung diatasi," ujarnya. (eza/uzi)

LAYANAN ADJIAN: Para orang tua konsultasi permasalahan SPMB di Posko Dinas Dikbud Sidoarjo kemarin (23/6).

NETTI LASTININGSIH Kabid Mutu Pendidikan Dinas Dikbud Sidoarjo

Dalam SPMB jalur domisili ini, hampir semua calon siswa memilih ke SMP negeri ketimbang swasta.



Bupati Harapkan Guru Tingkatkan Mutu Pendidikan

SIDOARJO - Lebih dari seratus guru SD negeri dan swasta di Kecamatan Balongbendo mengikuti Pengembangan Kompetensi Berkelanjutan (PKB) yang digelar Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) dan Forum Kelompok Kerja Guru (FKKG) Kecamatan Balongbendo. Bupati Harapkan Guru Tingkatkan Mutu Pendidikan. "Saya berharap PKB bukan hanya sekadar kewajiban administratif, tetapi harus menjadi bentuk tanggung jawab moral dan profesional untuk menyediakan layanan pendidikan yang berkualitas," ungkapnya. "Jika memang, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berkomitmen mendukung peningkatan kapasitas profesionalitas dan tenaga pendidik. Komitmen tersebut untuk memastikan bahwa anak-anak Sidoarjo mendapatkan pendidikan yang layak dari guru-guru yang berkualitas," ujarnya. (eza/uzi)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



MEMORANDUM
BEKERJA DAN MEMBELA TANAH AIR

SIDOARJO

memorandumredaksi@gmail.com
memorandum.disway.id
MemorandumTV & Memorandum Online
memorandum
memorandumonline & memorandumredaksi
memorandum

SELASA PAHING, 24 JUNI 2025

KEPALA BIRD: Budi Joko Santoso SP4 SH (Jokosea) WARTAMAN VILAK: Keresnan SH Mko, Muhammad Soud SH MR. PEMASARAN: Afiy Maulida, Suprianto, Pitono. KANTOR BIRD SIDOARJO: Perumahan Kalurahan Nirwana Village Blok B no 12 RT 023 RW 006 Desa Elokewu, Kec. Buduran, Kab Sidoarjo Kode Pos 61251. TELEPON SMS/WA REDAKSI: 08383036366-08383101777 EMAIL: antisidaj@gmail.com

HALAMAN 7

Kolaborasi Polsek Krembung-Pemdes Lemujut

Rawat Cabai untuk Swasembada Pangan

Sidoarjo, Memorandum

Mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan mewujudkan ketahanan pangan Polresta Sidoarjo, Kanitbinmas Polsek Krembung Aiptu Adin bersama Kepala Desa (Kades) Lemujut Ropik, melakukan aksi nyata dengan menanam bibit cabai di polybag. Komoditi itu ditanam di lahan milik pemdes.

Untuk mengawal kegiatan yang merupakan bagian dari program pekarangan pangan bergizi (P2B) yang digagas Polresta Sidoarjo itu, dilibatkan juga oleh jajaran Kanitbinmas Polsek Krembung dan jajaran Polsek Krembung. "Kami sangat terbantu dengan kehadiran

Aiptu Adin menyampaikan bahwa kegiatan ini tidak hanya berfokus pada penanaman, namun juga perawatan berkelanjutan agar hasil panen bisa maksimal dan berdampak langsung kepada masyarakat. "Kami juga melakukan pendampingan dan per-

awatan secara berkala. Harapannya, tanaman cabai ini bisa tumbuh subur dan hasilnya dapat meningkatkan ekonomi masyarakat," ujar Aiptu Adin, Senin (23/6). Lahan pekarangan yang digunakan untuk program ini dinilai sangat potensial. Selain subur, lokasinya mudah diakses dan bisa menjadi contoh nyata bagi warga lainnya dalam memanfaatkan pekarangan rumah secara produktif.

Kades Lemujut Ropik, juga mengapresiasi sinergi dalam meningkatkan ketahanan pangan tingkat desa. "Kami sangat terbantu dengan kehadiran

bhabinkamtibmas dan jajaran Polsek Krembung. Ini menjadi motivasi bagi warga untuk turut serta mengolah lahan pekarangan mereka demi kemandirian pangan desa," ungkapnya. Selain penanaman, kegiatan juga diisi dengan pengecekan kualitas tanah, pemberian pupuk, serta diskusi tentang pola tanam yang tepat untuk pekarangan. Ke depan, kegiatan seperti ini akan terus digalakkan dengan harapan Desa Lemujut bisa menjadi desa percontohan dalam hal ketahanan pangan di Kecamatan Krembung.

Pemdes Lemujut dan Polsek Krembung merawat tanaman cabai.



MEMORANDUM
BEKERJA DAN MEMBELA TANAH AIR

Hampir Semua Calon Murid Pilih SMP Negeri Dibanding Swasta

Pada SPMB Jalur Domisili

SIDOARJO - Pendaftaran Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tingkat SMP jalur domisili tuntas pada Sabtu (21/6). Kemarin (23/6) dan hari ini (24/6), pendaftar diverifikasi. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) mencatat hampir semua calon siswa lebih memilih SMP negeri dibanding SMP swasta.

Kabid Mutu Pendidikan Dinas Dikbud Netti Lastiningsih mengatakan, banyak calon siswa yang memprioritaskan SMP Negeri sebagai pilihan utama. "Calon siswa hampir semua memilih ke SMP negeri ketimbang swasta," katanya. Menurutnya, ada beberapa calon siswa yang memilih SMP swasta, tetapi rata-rata menjadi pilihan terakhir atau bukan prioritas.

Padahal, baru di tahun ini, ada tujuh sekolah swasta yang bisa dipilih oleh calon siswa pada SPMB



ANGGER BONDAN/JAWA POS

SPMB SMP JALUR DOMISILI

- Ada tujuh SMP swasta yang bisa dipilih.
- Banyak siswa lebih memilih SMP negeri dibanding swasta.
- Dinas Dikbud terima dan selesaikan keluhan. Mulai pertanyaan terkait skor jarak dan permasalahan login website pendaftaran.

Sumber: Dinas Dikbud Sidoarjo



jalur domisili.

Menurut Netti, pihaknya akan melihat lebih lanjut perkembangan tersebut saat pengumuman hasil seleksi nanti. Termasuk jika sekolah swasta keku-

rangan murid dari hasil seleksi SPMB jalur domisili. "Kami masih tunggu pengumuman, baru nanti coba carikan solusi," ujarnya.

Pengumuman SPMB Jalur Domisili dijadwalkan pada

Kamis (26/6) mendatang. Saat ini, proses SPMB masih tahap verifikasi data dan verifikasi lapangan. Tahapan ini berlangsung selama dua hari untuk memastikan data pendaftar sesuai dengan persyaratan.

"Tahap verifikasi ini penting untuk memastikan keabsahan data, termasuk terkait domisili," jelasnya. Terkait pelaksanaan pendaftaran jalur domisili tersebut, Dikbud banyak menerima keluhan dan



LAYANAN ADUAN:
Para orang tua konsultasi permasalahan SPMB di Posko Dinas Dikbud Sidoarjo kemarin (23/6).

Dalam SPMB jalur domisili ini, hampir semua calon siswa memilih ke SMP negeri ketimbang swasta."

NETTI LASTININGSIH
Kabid Mutu Pendidikan Dinas Dikbud Sidoarjo

pertanyaan dari orang tua. Mayoritas berkaitan dengan sistem penskoran jarak rumah ke sekolah yang menjadi salah satu faktor utama dalam seleksi domisili. Menurutnya, sosialisasi terkait penskoran jarak dan ketentuan lain sudah disampaikan jauh-jauh hari. "Kami menerima sejumlah aduan, tapi bisa langsung diatasi," ujarnya. (eza/uzi)

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



ANGGER BONDAN/JAWA POS

LINDUNGI DIRI: Warga menggunakan masker di Jalan dr Soetomo Magersari untuk menghindari virus dan polusi kemarin (23/6).

Antisipasi Sebaran Covid-19, Tenaga Kesehatan Siaga Penuh

SIDOARJO - Pemkab menerbitkan Surat Edaran (SE) kewaspadaan Covid-19 kemarin (23/6). Seluruh OPD dan jajaran tenaga kesehatan diminta siaga penuh. Meskipun, belum ada temuan.

SE tersebut sebagai tindak lanjut instruksi dari pemerintah pusat hingga tingkat provinsi terkait potensi penyebaran virus corona. Kepala

Dinas Kesehatan (Dinkes) Sidoarjo dr Lakhsmie Herawati Yuwentina menyam-

ini meminta seluruh OPD, jajaran tenaga kesehatan untuk siaga penuh," ujarnya.

Salah satu langkah yang dilakukan adalah meningkatkan kapasitas dan kesiapan tenaga kesehatan di puskesmas hingga rumah sakit. Termasuk petugas di Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda). Dinkes juga memperkuat koordinasi dengan Labkesda dalam hal pengambilan spesimen jika ditemukan kasus yang meng-

wali Luwuhanua menyan-
paikan, meski hingga saat
ini belum ditemukan adanya
kasus Covid-19 di Sidoarjo,
langkah antisipasi tetap
dilakukan secara ketat. "SE

menemukan kasus yang meng-
arah pada Covid-19. "Ma-
syarakat diimbau memerik-
sakan diri apabila mengalami
gejala infeksi saluran perna-
pasan," katanya. (eza/uzi)

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Sidoarjo

Jawa Pos METROPOLIS • SELASA 24 JUNI TAHUN 2025 | HALAMAN 18

Bupati Lepas 405 Atlet ke Porprov IX Jatim

Bonus Pemenang Naik Jadi Rp 50 Jutaan

SIDOARJO - Bupati Sidoarjo Subandi memberangkatkan 405 atlet dari total 1.286 atlet yang akan berlaga di Porprov IX Jatim di Malang dari Pendopo Delta Wibawa kemarin (23/6). Subandi minta atlet berjuang penuh untuk target 800 poin.

dah-mudahan ini jadi pemantik semangat atlet-atlet lain," katanya. Subandi mengatakan, akan ada peningkatan bonus dibanding tahun lalu atlet. "Bonusnya kita naikkan dari tahun lalu yang Rp 40 juta. Bisa nanti Rp 50 juta atau bahkan lebih, nanti kita umumkan. Intinya, kami ingin atlet termotivasi dan tidak kalah dari daerah lain," paparnya. Subandi mengatakan, bonus dan anggaran pembinaan seialan dengan komitmen Pemkab Sidoarjo dalam membangun



WAKILI SIDOARJO: Bupati Sidoarjo Subandi mengenakan jaket ke atlet yang akan berlaga dalam Porprov IX Jatim di Pendopo Delta Wibawa kemarin (23/6).
"Kami optimistis target tahun ini 800 poin. Mudah-mudahan bisa tercapai," ujarnya. (eza/uzi)

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

MITRA

Janji Tambah Bonus bagi Peraih Medali Porprov

SEBANYAK 1.322 atlet dan pelatih kontingen Kabupaten Sidoarjo, Senin (23/6) kemarin, diberangkatkan Bupati Sidoarjo, Subandi, dari pendopo delta wibawa, menuju Malang raya mengikuti ajang Porprov Jatim ke-IX tahun 2025.

Subandi menjanjikan bonus bagi atlet yang meraih medali dalam Porprov IX ini, akan dinaikkan dibandingkan bonus saat Porprov VIII tahun 2023 lalu.

“ Bonus

Subandi



Dipindai dengan CamScanner
halaman 11

HARIAN
Bhirawa
Buku Rakyat Kita Hidup

Janji Tambah Bonus bagi Peraih Medali Porprov

● Sambungan hal 1

atlet akan kita naikkan,” kata Subandi, saat memberi sambutan sebelum melepas atlet Sidoarjo.

Pada tahun 2025 ini, kata Subandi, anggaran hibah kepada KONI Sidoarjo dinaikkan menjadi Rp.16.500.000.000. Ada peningkatan dari tahun sebelumnya.

Dari perhatian Pemkab Sidoarjo itu, maka Subandi minta kepada para atlet Sidoarjo, usai bertanding dalam Porprov IX, saat pulang kembali ke Sidoarjo bisa membawa kemenangan.

Ketua KONI Sidoarjo, Imam Mukri Affandi, menyampaikan setelah memberangkatkan atlet pada Hari Senin, KONI Sidoarjo juga akan kembali memberangkatkan atletnya pada Hari Kamis (26/6) lusa.

Pemberangkatan atlet dan pelatih pada Porprov tahun 2025 ini, kata Imam, mengalami peningkatan sebanyak 326 orang atlet bila dibanding dengan Porprov Jatim tahun 2023 lalu.

“Tahun 2025 ini 67 cabor kita akan ikut bertanding,” ujarnya.

Imam melaporkan, pada Senin, 23 Juni, kontingen Sidoarjo, berada pada peringkat 2, dengan meraih 13 medali emas, 13 medali perak, 15 medali perunggu, atau mengumpulkan 93 poin.

“Pelepasan atlet oleh Bupati ini, semoga akan melecut dan memotivasi para atlet,” kata Imam.

Tantangan yang harus dijalani oleh atlet Sidoarjo pada Porprov 2025 ini, kata Imam, adalah meningkatkan perolehan poin dalam Porprov tahun 2025 ini. Bila tahun 2023 lalu berhasil mengumpulkan 680 poin, maka pada tahun 2025 ini harus bisa minimal 750 sampai

CS Dipped by Pengantar Scanner



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Progres SABH KD/KMP Jatim Tembus 94,7%

22 Daerah Sudah Tuntas

Sidoarjo — HARIAN BANGSA

Progres pengesahan akta pendirian koperasi dalam program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KD/KMP) di Jawa Timur terus menunjukkan hasil positif. Hingga Senin pagi, 23 Juni 2025 pukul 07.00 WIB, jumlah koperasi yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum (SABH) mencapai 8.040 unit, atau 94,7 persen dari total target 8.494 desa dan kelurahan.

Hal itu disampaikan Kakanwil Kemenkum Jatim Haris Sukanto saat Rapat Koordinasi Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih Provinsi Jawa Timur di Dinas Koperasi dan UKM Jatim, Senin 23 Juni 2025.

Sebanyak 22 kabupaten/kota telah tuntas 100%, termasuk Surabaya, Sidoarjo, Ponorogo, Jombang, dan Kota Pasuruan. Namun demikian, evaluasi dari Kanwil Kementerian Hukum Jawa Timur menunjukkan adanya perlambatan signifikan dalam laju penyelesaian pada hari-hari terakhir. Tercatat hanya 56 koperasi yang berhasil disahkan dalam 24 jam terakhir.

“Jika tidak ada percepatan luar biasa dalam dua-tiga hari ke depan, capaian 100 persen hingga akhir Juni akan sulit direalisasikan,” ujar Haris yang merupakan anggota Bidang Perizinan Satgas Percepatan Pembentukan KD/KMP Provinsi Jawa Timur.

Evaluasi Kanwil Kemenkum Jatim juga mencatat sejumlah kendala yang masih menghambat percepatan baik secara teknis, operasional, koordinasi maupun anggaran. Dari sisi teknis, perbedaan nama desa dengan data Kemendagri (Lumajang, Situbondo), serta SK AHU salah lokasi (Kelurahan Banjarmati tercatat di Kab. Bengkayang). (md/rus)



Kakanwil Kemenkum Jatim Haris Sukamto saat Rapat Koordinasi Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

DPMD Peringatkan Pemerintah Desa: Jangan Main-Main Soal PTSL

KOTA-Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sidoarjo menegaskan pentingnya transparansi dan kepatuhan dalam pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Plt Kepala DPMD Sidoarjo, Probo Agus Sunarno, mengingatkan agar pemerintah desa tidak bermain-main dalam menjalankan program yang menyentuh langsung kepentingan ma-

syarakat tersebut.

Probo menyebut bahwa sistem seleksi perangkat desa di Sidoarjo sudah berjalan secara terbuka dan akuntabel. Seleksi dilakukan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan BKD Provinsi Jawa Timur.

"Proses seleksi ini dirancang seperti rekrutmen ASN, tujuannya untuk menjaring SDM ter-

baik dan menghindari praktik pungli," ujarnya kepada Radar Sidoarjo, Senin (23/6).

Terkait pelaksanaan PTSL, Probo menyatakan bahwa regulasinya sudah jelas dan disosialisasikan ke seluruh desa. Ketentuannya mengacu pada Peraturan Bupati (Perbup) serta Surat Edaran Tiga Menteri.

"Kalau aturan sudah disampaikan dan dilanggar, maka itu menjadi risiko masing-masing. Kami

pastikan sosialisasi sudah dilakukan menyeluruh," tegasnya.

Ia juga menjelaskan bahwa pengawasan terhadap program PTSL dilakukan secara berlapis. Tak hanya internal, pengawasan juga dilakukan oleh aparat eksternal seperti kejaksaan, kepolisian, serta masyarakat dan media sebagai bentuk kontrol publik.

Menanggapi adanya laporan dugaan pungli dalam pelaksanaan PTSL di

beberapa desa, seperti Desa Gilang, Sidokerto, dan Sidokepong, Probo meminta seluruh pemerintah desa mematuhi regulasi yang berlaku.

"Jangan sampai program yang baik ini tercoreng oleh ulah oknum. Jika ada laporan, penanganan awal akan dilakukan oleh camat sebagai pembina wilayah. Bila ditemukan pelanggaran serius, akan kami limpahkan ke Inspektorat," jelasnya. (sai/vga)



BHS: Bandara Juanda Berpotensi Jadi Magnet Wisatawan Mancanegara



MENYAPA: Anggota DPR RI Bambang Haryo Soekartono saat meninjau Bandara Juanda, Sidoarjo, Senin (23/6).

SEDATI-Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono (BHS), menilai Bandara Internasional Juanda memiliki potensi besar sebagai pintu gerbang utama masuknya wisatawan mancanegara ke Jawa Timur. Dalam kunjungan kerjanya ke Terminal 1 Juanda, Senin (23/6), ia menyoroti pentingnya pengembangan infrastruktur dan peningkatan pelayanan bandara untuk menunjang sektor pariwisata.

"Saya ingin memastikan kesia-pan infrastruktur, karena ini adalah fasilitas vital untuk kelancaran transportasi udara, khususnya di wilayah Surabaya dan Jawa Timur," ujar BHS di lokasi.

Ia menilai kapasitas terminal domestik Juanda sudah memadai, namun menekankan perlunya perhatian khusus terhadap terminal internasional.

● Ke Halaman 10



BHS: Bandara Juanda...

Menurutnya, kendala fasilitas bisa menghambat pertumbuhan jumlah turis asing ke Jawa Timur.

"Sekarang kunjungan wisatawan mancanegara masih sekitar 250 hingga 350 ribu per tahun. Padahal kalau dikelola optimal, jumlah ini bisa meningkat 200–300 persen," tegasnya.

BHS juga mengungkapkan bahwa pihak pengelola bandara telah menyampaikan rencana pengembangan terminal internasional ke arah barat. Jika direalisasikan, kapasitas bandara bisa meningkat hingga tiga kali lipat.

Tak hanya soal fisik infrastruktur, BHS turut mengapresiasi konsep kuliner lokal yang dihadirkan di tenant-tenant dalam bandara. Ia menilai sajian makanan khas Jawa Timur, seperti cita rasa Suroboyoan dan Sidoarjoan, bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan.

"Pilihan kuliner di sini bisa menjadi daya tarik wisata. Bahkan masyarakat bisa datang ke bandara hanya untuk makan sambil melihat pesawat. Saya usulkan dibuat rooftop view seperti di Jepang atau Malaysia, agar pengunjung bisa menikmati suasana bandara dari luar," ujarnya. (dik/vga)





IST

ANTISIPASI: Proses penyembelihan hewan di Rumah Pemotongan Hewan (RPH) resmi di Krian menjadi contoh pemotongan yang sesuai standar.

Pemkab Akan Tindak Tegas Praktik Pemotongan Sapi Gelonggongan

KOTA-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo bersama Aparat Penegak Hukum (APH) akan menindak tegas praktik pemotongan sapi gelonggongan. Selain dianggap menyiksa hewan, praktik tersebut juga dinilai berbahaya bagi kesehatan masyarakat.

Bupati Sidoarjo, Subandi, menyatakan langkah ini merupakan upaya untuk melindungi masyarakat dari konsumsi daging yang tidak layak serta memberikan efek jera bagi pelaku kecurangan dalam proses pemotongan hewan.

● Ke Halaman 10

Pemkab Akan Tindak...

“Kami akan melakukan pemantauan menyeluruh di rumah potong hewan (RPH) dan peternakan-peternakan sapi,” ujar Subandi, Senin (23/6).

Ia menegaskan, pelaku yang terbukti melakukan praktik gelonggongan akan dikenakan sanksi berat, bahkan dapat diproses secara hukum. Menurutnya, praktik ini tidak hanya melanggar etika, tetapi juga menimbulkan risiko kesehatan serius bagi masyarakat.

“Saya minta jangan nekat melakukan praktik semacam itu. Silakan potong hewan sesuai aturan, yang pen-

ting tidak gelonggongan,” tegasnya.

Subandi juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima laporan adanya praktik pemotongan sapi gelonggongan di Desa Tropodo, Kecamatan Krian. Terkait hal itu, Pemkab akan segera berkoordinasi dengan Kapolres dan Kajari Sidoarjo untuk mengambil langkah hukum.

“Kemarin saya sudah menyampaikan, langkah pertama kami buat surat, dan berkoordinasi dengan APH, Pak Kapolres, dan Pak Kajari untuk menentukan langkah tegas yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah,” ungkapnya. (sai/vga)



TAMBAH SEMANGAT: Bupati Sidoarjo Subandi bersama Forkopimda saat melepas para atlet Kota Delta ke ajang Porprov Jatim IX di Malang.

Beri Motivasi, Bupati Naikkan Bonus Medali Emas untuk Atlet Porprov Rp 50 Juta

Bupati Sidoarjo Subandi, secara resmi melepas kontingen atlet Kota Delta yang akan berlaga dalam Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur IX di Malang. Acara pelepasan digelar di Pendapa Delta Wibawa, Senin (23/6), dengan diikuti total 1.286 atlet yang akan mewakili Sidoarjo.

M Saiful Rohman, Wartawan Radar Sidoarjo

DALAM sambutannya, Subandi meminta para atlet untuk bertanding dengan penuh semangat dan menjunjung tinggi sportivitas. Ia optimistis Sidoarjo bisa mencapai target 800 poin dalam ajang ini.

"Alhamdulillah, kita sudah memperoleh 12 medali emas dari cabang olahraga yang lebih dulu bertanding. Saya minta para atlet terus semangat mengejar target 800 poin," ujarnya.

Subandi juga menyampaikan bahwa Pemkab Sidoarjo memberikan dukungan penuh terhadap dunia olahraga, salah satunya melalui alokasi anggaran pembinaan yang

● Ke Halaman 10



Beri Motivasi,...

mencapai Rp 16 miliar pada tahun ini. "Anggaran itu kami siapkan untuk mendukung prestasi atlet sekaligus membangun ekosistem olahraga yang berkelanjutan di Sidoarjo," tambahnya.

Tak hanya itu, Pemkab juga menaikkan bonus bagi atlet peraih medali. Jika tahun lalu bonus medali emas sebesar Rp 40 juta, tahun ini nilainya akan meningkat menjadi Rp 50 juta

atau lebih. "Nilai pastinya akan kami umumkan nanti. Yang jelas, kami ingin memberikan motivasi lebih bagi para atlet," jelas Subandi.

Pada Porprov sebelumnya, Sidoarjo berhasil mengumpulkan 680 poin. Dengan persiapan yang lebih matang tahun ini, target pun dinaikkan menjadi 800 poin.

"Kami harap seluruh atlet menjaga sportivitas dan membawa nama baik Sidoarjo dalam setiap pertandingan,"

pesannya.

Ketua KONI Sidoarjo, Imam Mukri, menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemkab. Menurutnya, perhatian Bupati menjadi suntikan semangat yang sangat berarti bagi seluruh kontingen.

"Terima kasih kepada Pak Bupati atas dukungan dan perhatiannya. Ini menjadi bukti nyata bahwa olahraga di Sidoarjo benar-benar mendapat tempat dan prioritas," pungkasnya. (sai/vga)





LOETFI/DUTA

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) KKKS dan FKKG Kecamatan Balongbendo, Senin (23/6/25)

Bupati Harapkan Guru Tingkatkan Mutu Pendidikan

SIDOARJO - Lebih dari seratus guru SD negeri dan swasta di Kecamatan Balongbendo mengikuti Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) yang digelar Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) dan Forum Kelompok Kerja Guru (FKKG) Kecamatan Balongbendo.

Kegiatan yang bertujuan meningkatkan kualitas layanan pendidikan di Kabupaten Sidoarjo itu dibuka langsung oleh Bupati Sidoarjo H. Subandi di Pendopo Delta Wibawa, Senin (23/6/25).

Bupati H. Subandi mengatakan bahwa dunia pendidikan di Kabupaten Sidoarjo terus bergerak dinamis dan berorientasi pada peningkatan mutu layanan. Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama untuk memajukan pendidikan di Kabupaten Sidoarjo. Ia optimistis, guru sebagai kunci peradaban dan kepala sekolah sebagai pemimpin perubahan akan mampu mewujudkan hal tersebut.

"Kemajuan pendidikan tidak akan terwujud tanpa adanya komitmen bersama untuk terus belajar,

beradaptasi, dan meningkatkan kompetensi secara berkelanjutan," ujarnya.

Bupati menegaskan bahwa program PKB sangat relevan dan strategis dalam mendukung kemajuan pendidikan. Ia meminta agar program PKB tidak hanya dipahami sebagai kewajiban administratif, melainkan dimaknai sebagai tanggung jawab moral dan profesional dalam menyediakan layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan bermakna bagi generasi penerus bangsa.

"Saya berharap PKB bukan hanya sekadar kewajiban administratif, tetapi harus menjadi bentuk tanggung jawab moral dan profesional untuk menyediakan layanan pendidikan yang berkualitas," tegasnya.

Ia juga menegaskan, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berkomitmen mendukung peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan. Komitmen tersebut untuk memastikan bahwa anak-anak Sidoarjo mendapatkan pendidikan yang layak dari guru-guru

yang hebat dan sekolah-sekolah yang berkualitas.

"Di tangan panjenengan semua, masa depan Sidoarjo ditentukan," ungkapnya.

Bupati berharap melalui workshop ini, para kepala sekolah dan guru tidak hanya menambah pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga membangun jejaring profesional yang solid. Selain itu, diharapkan mampu menyusun perencanaan pembelajaran yang kontekstual, mengembangkan budaya refleksi, serta mendorong inovasi dalam proses belajar mengajar. Yang lebih penting, lanjutnya, adalah menumbuhkan kembali semangat sebagai pendidik sejati yang melayani dengan hati.

"Saya ucapkan selamat mengikuti workshop. Gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk belajar, berbagi, dan bertumbuh bersama. Semoga kegiatan ini membawa manfaat besar bagi peningkatan mutu pendidikan di Kecamatan Balongbendo khususnya, dan Kabupaten Sidoarjo pada umumnya," pungkasnya. ● Loe



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Bupati Subandi Terbitkan SE Sertifikasi Halal Untuk Mendukung Destinasi Wisata Halal di Sidoarjo

Media Sorot Mata 19 Juni 2025

Yuk, Dukung Sidoarjo Jadi
DESTINASI WISATA HALAL
YANG RAMAH UNTUK SEMUA WISATAWAN

SELURUH PELAKU USAHA MAKANAN & MINUMAN DI KABUPATEN SIDOARJO DI HIMBAU UNTUK SEGERA MENGURUS SERTIFIKASI HALAL SESUAI UU NO. 33 TAHUN 2014.

BERLAKU UNTUK :

- UMKM Kuliner
- Rumah Makan
- Restoran
- Jasa Boga & Lainnya

MANFAAT SERTIFIKASI HALAL :

- Meningkatkan kepercayaan konsumen, khususnya wisatawan Muslim
- Mendorong pertumbuhan pariwisata halal
- Menambah nilai jual produk usaha masyarakat.

INFO TEKNIS DAN CARA PENDAFTARAN

@disperindagsidoarjo
0881026772000

JANGAN KHAWATIR, PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO SIAP MEMBERIKAN PENDAMPINGAN TEKNIS & FASILITASI MELALUI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN.

H. Subandi, S.H., M.Kn
Bupati Sidoarjo

Hj. Mimik Idayana
Wakil Bupati Sidoarjo

SERTIFIKASI HALAL BUKAN HANYA KEWAJIBAN, TAPI JUGA PELUANG EMAS UNTUK UMKM DAN WISATA SIDOARJO NAIK KELAS



SIDOARJO/MEDIAAOROTMATA.COM – Bupati Sidoarjo Subandi resmi mengeluarkan surat edaran (SE), mengimbau seluruh pelaku usaha makanan dan minuman di Kabupaten Sidoarjo untuk segera mengurus sertifikasi halal.

Imbauan ini merupakan bagian dari strategi besar pengembangan destinasi wisata halal di wilayah Sidoarjo, sekaligus wujud implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Dalam surat edaran tersebut, Bupati Sidoarjo menekankan bahwa seluruh pelaku usaha kuliner, mulai dari UMKM, rumah makan, restoran, hingga jasa boga, wajib memiliki Sertifikat Halal yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah daerah untuk membangun citra Sidoarjo sebagai destinasi wisata yang ramah.

“Sertifikasi halal bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga peluang strategis untuk meningkatkan daya saing produk lokal di pasar nasional maupun internasional,” ujar Subandi, Rabu (19/6/2025).

Langkah ini juga diharapkan dapat menumbuhkan kepercayaan wisatawan muslim, yang kian selektif dalam memilih produk kuliner selama berwisata.

Dengan jaminan halal yang sah dan terpercaya, Sidoarjo siap menyambut wisatawan dengan sajian kuliner yang tidak hanya lezat, tetapi juga sesuai syariat.

Surat Edaran ini sebagai bentuk dukungan konkret, sejumlah OPD terkait seperti Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata, DPMPSTP, Dinas Kesehatan, serta Kementerian Agama, akan memberikan pendampingan teknis dan fasilitasi pengurusan sertifikat halal bagi pelaku usaha,” jelasnya.

Lebih lanjut, Subandi juga menekankan kepada Camat, Lurah, dan Kepala Desa untuk aktif dalam menyosialisasikan pentingnya sertifikasi halal kepada masyarakat di wilayah kerja masing-masing.

Program ini menjadi bagian dari rencana jangka panjang Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk meningkatkan kualitas destinasi wisata lokal, memperluas jangkauan pasar UMKM, dan memperkuat posisi Sidoarjo sebagai tujuan wisata yang aman, nyaman, dan inklusif bagi semua kalangan. (Nuri)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Ngaku Ditinggal, Wabup Sidoarjo dan Penasehat Dukung Fraksi Partai Gerindra Tolak Permintaan Maaf Bupati Saat Paripurna

Redaksi

Kamis, 19 Jun 2025 20:01 WIB



DUKUNG - Ketua DPC Partai Gerindra Sidoarjo, Mimik Idayana dan Ketua Dewan Penasehat DPC Partai Gerindra Sidoarjo, Rahmat Muhajirin mendukung sikap Fraksi Partai Gerindra DPRD Sidoarjo menolak permintaan maaf Bupati Sidoarjo dan walk out saat paripurna.

Sidoarjo (republikjatim.com) - Wakil Bupati (Wabup) Sidoarjo, Mimik Idayana yang sekaligus menjabat sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo mendukung



Sidoarjo (republikjatim.com) - Wakil Bupati (Wabup) Sidoarjo, Mimik Idayana yang sekaligus menjabat sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo mendukung penuh sikap politik Fraksi Partai Gerindra DPRD Sidoarjo yang menolak permintaan maaf Bupati Sidoarjo Subandi saat rapat Paripurna, Selasa (17/06/2025) kemarin. Salah satu penyebabnya, selama ini Wabup Sidoarjo merasa ditinggal dan tidak pernah diajak bicara untuk memutuskan sejumlah kebijakan yang dihasilkan sebagai kebijakan Pemkab Sidoarjo

Karena itu, Ketua DPC Partai Gerindra Sidoarjo, Mimik Idayana memberikan pernyataan sikap politik partainya yang siap bertarung dengan kebijakan Bupati Sidoarjo. Selain itu, mendukung sikap politik yang disampaikan Fraksi Partai Gerindra DPRD Sidoarjo yang menolak permintaan maaf Bupati Sidoarjo saat Rapat Paripurna kemarin. Bahkan, Mimik sempat mengakui hubungannya dengan Bupati Sidoarjo di pemerintahan saat ini tidak dalam kondisi baik-baik.



Selasa, 24 Jun 2025 08:27 WIB

Pain Sementara Dibawa Surabaya, Atlet Parprov Jatim IX Dilepas Bupati Sidoarjo Didoakan Kiai Rebut Medali Emas

"Sekarang ini, ibarat kacang lupa kulitnya. Masyarakat tahu, dia (Bupati Sidoarjo) bisa menjadi Bupati karena diusung partai kami (Partai Gerindra) dalam Pilkada kemarin. Sedangkan partai lain (Partai Golkar dan Partai Demokratik) kan sebagai pelengkap saja. Ternyata, sejarah sudah tidak tahu diri dan sama sekali tidak menghargai jerih payah kami," ujar Mimik Idayana, Kamis (19/06/2025) didampingi Rahmat Muhajirin yang menjabat sebagai Ketua Dewan Penasehat DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo.

Lebih jauh, Mimik Idayana menguraikan saat ini, dirinya merasa telah ditinggalkan Bupati Sidoarjo. Karena itu, partainya (Gerindra) memutuskan untuk menarik dukungan terhadap Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo. Apalagi, sebagai Partai Gerindra sebagai pengusung merasa tidak perlu lagi memberikan masukan konstruktif kepada Bupati Sidoarjo dalam mengelola Pemkab Sidoarjo. Bahkan Partai Gerindra, kata Mimik juga tidak perlu 'pasang badan' untuk kepentingan politik Bupati Sidoarjo dalam mengelola pemerintahan.

"Selain itu, tidak perlu lagi mengawal pemerintahan Bupati Sidoarjo sampai masa baktinya berakhir Tahun 2029 mendatang. Bagi kami sikap politik Fraksi Partai Gerindra menolak permintaan maaf Bupati Sidoarjo itu sudah tepat. Karena dalam konteks itu tidak cukup hanya minta maaf saja. Tapi, harus bisa mengklarifikasi dan mencabut statemennya secara terbuka. Karena saya sendiri juga tidak setuju dengan pernyataan DPRD menghambur - hamburkan uang itu," ungkap Mimik Idayana.

Tidak hanya itu, Mimik juga menegaskan selama ini dirinya sebagai Wakil Bupati (Wabup) Sidoarjo juga tidak dihargai oleh Bupati Sidoarjo. Bahkan dalam seluruh kebijakan pengelolaan pemerintahan, dirinya kerap diabaikan. Bahkan, tidak dilibatkan, termasuk dalam proses pengambil kebijakan dan keputusan.

"Contohnya seperti pembuatan Peraturan Bupati (Perbup) mengatur nilai besaran insentif petugas pajak atau Perbup mengatur pegawai P3K baru-baru ini. Atas kedua kebijakan itu, jangankan saya diminta pertimbangan, diajak ngomong saja tidak. Padahal, Bupati dan Wakil Bupati itu menjadi satu kesatuan dalam pemerintahan. Jadi kesabaran saya sudah cukup. Saya tegasnya hubungan saya dengan Pak Bupati tidak dalam kondisi baik-baik saja," tegasnya.

Sementara Ketua Dewan Penasehat Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo, Rahmat Muhajirin menilai sikap politik Fraksi Gerindra DPRD Sidoarjo yang menolak permintaan maaf Bupati Sidoarjo itu sudah tepat. Bahkan, hal itu sesuai garis kebijakan pengurus DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo.

"Kami juga memastikan sikap Fraksi Partai Gerindra solid, meski dalam sidang paripurna kemarin, tidak semua anggota hadir. Karena sebagian mereka yang tidak hadir dalam sidang paripurna itu, ada yang sakit, beribadah haji dan ada acara keluarga yang tidak bisa ditinggalkan. Kami juga sudah berkomunikasi dengan semua anggota Fraksi Partai Gerindra dan partai kami tetap solid sampai sekarang," jelasnya.

Tidak hanya itu, lanjut Rahmat yang juga mantan anggota DPR RI periode 2019 sampai 2024 ini menghargai sikap politik yang diambil Fraksi Partai Gerindra DPRD Sidoarjo yang 'melawan' kebijakan dan sikap Bupati Sidoarjo. Hal ini semata karena menjaga marwah DPRD Kabupaten Sidoarjo.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

Tidak hanya itu, Mimik juga menegaskan selama ini dirinya sebagai Wakil Bupati (Wabup) Sidoarjo juga tidak dihargai oleh Bupati Sidoarjo. Bahkan dalam seluruh kebijakan pengelolaan pemerintahan, dirinya kerap diabaikan. Bahkan, tidak dilibatkan, termasuk dalam proses pengambil kebijakan dan keputusan.

"Contohnya seperti pembuatan Peraturan Bupati (Perbup) mengatur nilai besaran insentif petugas pajak atau Perbup mengatur pegawai P3K baru-baru ini. Atas kedua kebijakan itu, jangankan saya diminta pertimbangan, diajak ngomong saja tidak. Padahal, Bupati dan Wakil Bupati itu menjadi satu kesatuan dalam pemerintahan. Jadi kesabaran saya sudah cukup. Saya tegasnya hubungan saya dengan Pak Bupati tidak dalam kondisi baik-baik saja," tegasnya.

Sementara Ketua Dewan Penasehat Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo, Rahmat Muhajirin menilai sikap politik Draksi Gerindra DPRD Sidoarjo yang menolak permintaan maaf Bupati Sidoarjo itu sudah tepat. Bahkan, hal itu sesuai garis kebijakan pengurus DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo.

"Kami juga memastikan sikap Fraksi Partai Gerindra solid, meski dalam sidang paripurna kemarin, tidak semua anggota hadir. Karena sebagian mereka yang tidak hadir dalam sidang paripurna itu, ada yang sakit, beribadah haji dan ada acara keluarga yang tidak bisa ditinggalkan. Kami juga sudah berkomunikasi dengan semua anggota Fraksi Partai Gerindra dan partai kami tetap solid sampai sekarang," jelasnya.

Tidak hanya itu, lanjut Rahmat yang juga mantan anggota DPR RI periode 2019 sampai 2024 ini menghargai sikap politik yang diambil Fraksi Partai Gerindra DPRD Sidoarjo yang 'melawan' kebijakan dan sikap Bupati Sidoarjo. Hal ini semata karena menjaga marwah DPRD Kabupaten Sidoarjo.



Selasa, 24 Jun 2025 05:53 WIB

Bupati Sidoarjo Berharap Guru Tingkatkan Mutu Pendidikan, Reflektif dan Inovatif Bentuk Jejaring Profesional

"Sikap ini juga sebagai bukti Partai Gerindra tidak lagi berada di pemerintahan. Karena Bupati Sidoarjo sendiri yang sengaja meninggalkan Partai Gerindra," paparnya.



Seorang Perempuan Masih DPO, Polisi Sidoarjo Amankan Rp 1 Miliar Lebih dalam OTT Penjarangan Perangkat di Tulangan •
Rahmat menyangkal sikap politik Fraksi Partai Gerindra DPRD Sidoarjo bersama mayoritas Fraksi lain di DPRD Sidoarjo yang menolak permintaan maaf Bupati Sidoarjo (Subandi) sebagai bukti awal atau bahkan embrio untuk menuju agenda politik lebih besar. Yakni pemakzulan Bupati Sidoarjo.

"Sikap politik Fraksi Partai Gerindra dalam konteks sekarang ini tidak ada tujuan untuk pemakzulan. Tapi, tidak tahun-tahun ke depan. Kita lihat saja nanti. Karena koalisi yang selama ini dibangun telah dikhianati," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, bola panas pernyataan Bupati Sidoarjo, Subandi soal tugas anggota DPRD Sidoarjo menghambur-hamburkan uang dan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Sidoarjo yang tidak sesuai dengan visi dan misi Bupati Sidoarjo rawan tersangkut masalah hukum belum selesai. Ini menyusul, para wakil rakyat ini justru mengajukan interupsi dan walk out dalam sidang paripurna yang awalnya sesuai absensi dihadiri sekitar 36 anggota DPRD Sidoarjo, Selasa (17/06/2025) sore.

Padahal, Bupati Sidoarjo Subandi sudah menyampaikan permintaan maaf kepada pimpinan dan anggota DPRD Sidoarjo dalam sidang Paripurna Jawaban Bupati Sidoarjo atas Pandangan Umum (PU) sejumlah fraksi yang ada di DPRD Sidoarjo dalam sidang paripurna itu. Para anggota dewan yang walk out itu, diduga menilai permintaan maaf Bupati Sidoarjo itu tidak tulus (ikhlas). Apalagi, tidak secara spesifik menyebutkan klarifikasi permohonan maaf atas dua pernyataan yang viral diupload di Media Sosial (Medsos) pada 19 Maret 2025 lalu.



Senin, 23 Jun 2025 21:58 WIB

Seorang Perempuan Masih DPO, Polisi Sidoarjo Amankan Rp 1 Miliar Lebih dalam OTT Penjarangan Perangkat di Tulangan

Sontak rapat paripurna yang awalnya dinilai quorum, pada akhirnya saat Bupati Sidoarjo dan Ketua DPRD Sidoarjo sebelum mengakhiri Rapat Paripurna ini, hanya tinggal sekitar 13 - 15 anggota dewan yang duduk di kursinya masing-masing. Sisanya, sudah melaksanakan aksi Walk Out usai anggota Fraksi Partai Gerindra, Bambang Pujiono yang juga menjabat Ketua Komisi B DPRD Sidoarjo meninggalkan ruang rapat itu setelah menyatakan keberatan dengan permintaan maaf Bupati Sidoarjo itu.

Dalam rapat Paripurna yang membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD Tahun Anggaran 2024 yang dipimpin Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih didampingi Wakil Ketua DPRD Sidoarjo Suyarno itu sempat tegang. Hal ini lantaran tidak hanya satu atau dua orang anggota DPRD Sidoarjo yang meninggalkan lokasi sidang. Namun mencapai puluhan hingga menyisakan belasan orang anggota DPRD saja, yang mengikuti rapat paripurna hingga selesai.

Selain itu, dalam rapat paripurna yang dihadiri hampir seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Sidoarjo, Forkopimda dan organisasi vertikal di Kabupaten Sidoarjo ini, Bupati Sidoarjo hampir menjawab seluruh Pandangan Umum (PU) Fraksi di DPRD Sidoarjo.

Bahkan Bupati Sidoarjo, Subandi juga menyikapi tuntutan permintaan maaf oleh enam fraksi, yakni Fraksi Partai Gerindra, PKB, PDI Perjuangan, PAN, Nasdem-Demokrat dan Fraksi PKS-PPP. Permintaan maaf ini, terkait kegaduhan yang dipicu statemen Bupati Sidoarjo yang pernah dimuat media online maupun cetak serta disebarluaskan di media sosial tanggal 19 Maret 2025 kemarin. Terutama soal statemen yang menyebutkan Pokir DPRD Sidoarjo yang tidak sesuai dengan visi dan misi Bupati Sidoarjo rawan mengarah korupsi. Selain itu, juga disebutkan Bupati dan Wakil Bupati bekerja untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) DPRD tugasnya menghambur-hamburkan uang. Any/ww

Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Beranda > Berita TNI/Polri >

Pemkab Sidoarjo Lindungi Masyarakat Konsumsi Pangan Segar Terkontaminasi Residu

Jejak KasusTV
19 Juni 2025 2 views



Sidoarjo | jejakkasustv.com – Pemkab Sidoarjo berupaya meningkatkan keamanan produk pangan segar yang dikonsumsi masyarakat.

Produk pangan segar seperti buah, sayur, ikan dan daging yang beredar akan diawasi ketat untuk memastikan produk pangan tersebut aman dikonsumsi dan tidak membahayakan kesehatan.

Produk pangan segar yang beredar ke masyarakat harus benar-benar terhindar dari residu pestisida, residu antibiotik ataupun formalin.



Dalam acara yang dibuka langsung oleh Bupati Sidoarjo H. Subandi tersebut juga melibatkan puluhan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Mereka diajak untuk ikut berpartisipasi dalam melakukan pendampingan keamanan PSAT.

Bupati Sidoarjo H. Subandi mengatakan pemerintah daerah berkewajiban menjamin penyelenggaraan keamanan pangan di setiap rantai pangan secara terpadu.

Disampaikannya penyelenggaraan keamanan pangan bertujuan untuk menjaga pangan tetap aman, higienis, bermutu dan bergizi.

Oleh karenanya salah satu upaya pemerintah untuk menjamin keamanan pangan adalah melalui pengawasan keamanan pangan segar yang beredar di pasar oleh pelaku usaha.

“Pendampingan keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan salah satu bentuk upaya pemerintah dalam memberikan jaminan dan perlindungan keamanan dan mutu produk pangan segar yang akan dikonsumsi oleh masyarakat atau konsumen,” ucapnya.

Bupati H. Subandi juga menghimbau kepada para produsen, pelaku usaha, dan konsumen untuk memperhatikan mutu dan keamanan produk pangan segar yang beredar.

Oleh karenanya kegiatan pendampingan PSAT seperti dirasa penting dilakukan. Menurutnya lewat kegiatan seperti ini akan meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kemampuan masyarakat terhadap keamanan pangan, bahaya dan resiko pangan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan pangan.

“Selaku pimpinan daerah, saya berharap melalui pertemuan ini, seluruh yang hadir disini menjadi lebih peduli terhadap produk pangan segar kita dan siap menjalankan sesuai dengan kompetensi dan perannya,” kata dia.

Sementara itu Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Sidoarjo Eni Rustianingsih mengatakan produk pangan impor sudah membanjiri pasaran. Kondisi tersebut mengharuskan produk pangan lokal harus mampu bersaing dipasaran.

Lebih dari itu produk pangan lokal yang beredar harus benar-benar aman dikonsumsi. Dirinya juga telah melakukan pendampingan pengawasan PSAT untuk meningkatkan kualitas pangan. Kegiatan tersebut dilakukan dibulan Januari sampai Juni dengan cara sosialisasi sampai mengambil sample produk pangan segar.

“Produk-produk impor sudah masuk ke Indonesia, sebelum kita masuk daya saing, maka seluruh stakeholder terutama adik-adik generasi muda agar pilah dan pilih pangan yang ada,” ucapnya. (Nit/git/kominfo)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Buntut Aksi Tolak Mentah-mentah Permintaan Maaf Subandi, Partai Gerindra Putuskan Cabut Dukungan Politik Ke Subandi.

dimensin | 19 Juni 2025, 14:51 pm | 0 comments | 359 views



Wakil Bupati Sidoarjo Hj Mimik Idayana

Ketua Dewan Penasehat DPC Partai Gerindra Sidoarjo H Rahmat Muhairin (Foto2



DIMENSINEWS.COM SIDOARJO : Wakil Bupati Sidoarjo Hj Mimik Idayana merespon cepat sikap politik 9 anggota dewan dari Fraksi Partai Gerindra serta 26 anggota dewan 5 fraksi lain yang menolak mentah-mentah permintaan maaf Bupati Sidoarjo Subandi dalam agenda sidang paripurna ke 3 dengan agenda utama pembahasan Raperda LKPD APBD Bupati Tahun 2024 Selasa (17/6) lusa kemarin.

Orang nomor dua Sidoarjo yang juga menjabat sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Sidoarjo menegaskan bahwa ia tak hanya mendukung penuh sikap politik 9 anggota fraksi dari partainya, Mimik Idayana juga secara blak-blakan memutuskan bahwa ia dan Partai Gerindra lebih memilih jalan bersebrangan dengan Subandi.

"Saya harus jujur katakan bahwa hubungan saya saat ini dengan Pak Bupati Subandi di pemerintahan dalam keadaan tidak baik-baik saja" ungkap Mimik kepada sejumlah awak media yang menemuinya di rumah dinas Kamis (19/6) pagi tadi.

Lebih tandas, Mimik menyebut bahwa Bupati Subandi saat ini adalah figur manusia yang sama sekali tidak bisa menghargai jerih payah dan pengorbanan orang, serta sama sekali tak tahu berterima kasih.

"Seperti ungkapan dalam peribahasa kacang yang telah lupa dengan kulitnya" cetus Mimik dengan nada sesal.

Padahal, lanjutnya hampir seluruh masyarakat/warga Sidoarjo sudah tahu bahwa dia bisa menjadi bupati seperti sekarang karena jasa dari Partai Gerindra yang telah mengusungnya.

"Harus diingat Partai Gerindra adalah partai pengusung utama sementara 2 partai lain (Golkar, Nasdem) hanya sebagai partai pendukung pelengkap saja. Namun ternyata pada perkembangannya ia seperti sudah tak menganggap pengorbanan kita. Orang-orang yang telah berjasa dan berjuang sehingga ia bisa menjadi seperti saat ini" ucap Mimik setengah menahan amarah.

Lebih jauh, dengan didampingi suaminya H Rahmat Muhajirin Mimik mengungkapkan sebagai orang nomor satu di Partai Gerindra Sidoarjo selama ini seperti telah diabaikan oleh Bupati Subandi.

Maka atas berbagai pertimbangan politik, ia juga memutuskan untuk menarik dukungan terhadap pemerintahan.

Artinya, menurutnya sebagai partai pengusung merasa tidak perlu lagi memberikan masukan yang konstruktif kepada Bupati Subandi dalam mengelola pemerintahan.

Seluruh jajaran dan kader Partai Gerindra juga tidak perlu lagi harus capek-capek 'pasang badan' dan membantu kepentingan politik Bupati Subandi dalam mengelola pemerintahan.

"Lebih jelas Partai Gerindra mulai saat ini tidak perlu lagi mengawal pemerintahan Bupati Subandi sampai masa baktinya berakhir pada 2029" tuturnya dengan nada serius.

"Jadi sikap politik fraksi Gerindra yang menolak permintaan maaf itu sudah tepat. Karena dalam konteks itu tidak cukup hanya minta maaf, namun harus bisa mengklarifikasi dan mencabut statemennya secara terbuka. Karena saya sendiri juga tidak setuju dengan pernyataan bahwa DPRD menghambur-hamburkan uang,"





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

tegas Wabup Mimik.

Masih kata Mimik, selama mendampingi Subandi, dirinya sebagai wakil bupati tidak dihargai oleh Bupati Subandi. Dalam pengelolaan pemerintahannya dirinya diabaikan, bahkan juga kerap tidak dilibatkan, termasuk dalam proses pengambilan kebijakan.

Seperti pembuatan Peraturan Bupati (Perbup) mengatur intensif petugas pajak atau Perbup mengatur pegawai P3K baru-baru ini. "Jangankan saya diminta pertimbangan, diajak ngomong saja tidak. Padahal Bupati dan Wakil Bupati itu merupakan kesatuan dalam pemerintahan," ujarnya.

"Jadi kesabaran saya sudah cukup. Saya tegasnya hubungan saya dengan Pak Bupati tidak baik-baik saja," lugas Mimik.

Ungkapan senada juga dilontarkan Ketua Dewan Penasehat Partai Gerindra Sidoarjo Rahmad Muhajirin.

Ia menegaskan sikap politik fraksi Gerindra DPRD Sidoarjo yang menolak permintaan maaf Bupati Subandi sudah tepat, sesuai garis kebijakan pengurus Partai Gerindra Sidoarjo. Pihaknya juga menyatakan fraksinya solid, meski dalam sidang paripurna kemarin, tidak semua anggota hadir.

"Mereka yang tidak hadir dalam sidang paripurna itu karena ada yang sakit, beribadah haji dan acara keluarga tidak bisa ditinggalkan. Kami pun sudah berkomunikasi dengan semua anggota fraksi, dan tetap solid," ujarnya.

Lebih lanjut, Babe RM, sapaan akrab mantan anggota Komisi 3 DPR RI periode 2019-2024 ini menghargai sikap politik yang diambil fraksi Gerindra yang 'melawan' Bupati Subandi ini semata karena menjaga marwah DPRD. Ini juga sebagai bukti bahwa Gerindra tidak lagi berada di pemerintahan. Karena Bupati sendiri yang meninggalkan Gerindra," katanya.

Pihaknya menyangkal sikap politik fraksi Gerindra bersama mayoritas fraksi DPRD yang menolak permintaan maaf Bupati Subandi ini sebagai embrio untuk menuju agenda politik lebih besar, yakni pemakzulan Bupati Subandi.

Sikap politik fraksi Gerindra dalam konteks saat sekarang ini tidak ada tujuan untuk pemakzulan.

"Nggak tahu ke depannya, kita lihat saja nanti," tandas politisi yang dikenal dekat dengan media ini. (Dil)

Posted in Politik



Proses Hukum Belum Tuntas, Hasil Perundingan Belum Jelas

Sengketa Parkir antara Dishub Sidoarjo dan PT ISS

20 Juni 2025 10:07

 **Fathur Roziq, Fathur Roziq**
Redaksi Ketik.co.id



Sidang gugatan sengketa parkir antara Dishub Sidoarjo dan PT ISS Mei lalu. Belum ada putusan dari hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo. (Foto: Fathur Roziq/Ketik.co.id)

Politik & Pemerintahan



Aa AA

KETIK, SIDOARJO – Sengketa pengelolaan parkir di Sidoarjo belum juga usai. Pendapatan daerah pun minim. Pemkab Sidoarjo dan PT Indonesia Sarana Servis (ISS-KSO) selaku pengelola parkir berunding di luar meja pengadilan untuk mencari *win-win solution*. Belum ada kata sepakat.



"Hari ini kita membahas beberapa solusi yang kami tawarkan. Namun, pihak ISS belum bisa memutuskan karena masih perlu melapor dulu kepada pimpinannya," kata Sekda Fenny setelah perundingan selesai.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Sidoarjo Benny Airlangga menjelaskan, hingga saat ini, sengketa pengelolaan parkir antara PT ISS dan Pemkab (Dishub) Sidoarjo masih berlangsung di Pengadilan Negeri Sidoarjo. Dishub diwakili oleh Kejaksaan Negeri Sidoarjo sebagai pengacara negara. Tinggal menunggu putusan.

"Putusan gugatan tentang pemutusan kerja sebenarnya Minggu lalu, tapi ditunda dua Minggu lagi," ungkap. PT ISS juga melayangkan lagi gugatan terhadap Dishub Sidoarjo terkait wanprestasi dan memasuki tahap mediasi.

Secara terpisah, Direktur operasional PT ISS Dian Sucipto menyebutkan, dalam rapat koordinasi ini, kedua pihak diminta untuk berintrospeksi dan mengevaluasi diri. Baik pihak Dishub Sidoarjo maupun PT ISS.

"Ya, tadi diminta introspeksi masing-masing pihak dulu. Dari ISS, bagaimana, dari dishub seperti apa," katanya. Menurut Dian Sucipto, masa kontrak kerja sama tinggal 6 bulan. Karena itu, kelanjutannya masih menunggu hasil koordinasi.

Baca Juga:

Golkar Sidoarjo Fokus Tagih Janji 14 Program BAIK, Tak Tertarik Kegaduhan Politik

Sengketa pengelolaan parkir antara PT ISS dan Dishub Sidoarjo ini sudah berlangsung sekitar 3 tahun. Sejak kerja sama antara keduanya ditandatangani, pengelolaan parkir tidak optimal. Akibatnya, pendapatan daerah pun sangat minim. Target semula Rp 32 miliar. Namun, yang masuk ke Pemkab Sidoarjo hanya Rp 6,6 miliar. (*)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Berita, Jawa Timur, Sidoarjo

Minimalisasi Banjir Bupati Lakukan Susur Sungai Mbah Gepuk

Ali
20 Juni 2025



Bupati Sidoarjo H. Subandi, SH.,Kn bersama Kepala Dinas PU Binamarga serta beberapa pejabat di Sidoarjo menyusuri sungai Mbah Gepuk, Jum'at (20/06/2025) (Foto Istimewa)

SIDOARJO - JATIM | SUDUTPANDANG.ID – Bupati Sidoarjo H. Subandi, SH.,Kn bersama Kepala Dinas PU Binamarga serta beberapa pejabat di Sidoarjo menyusuri sungai Mbah Gepuk, Jum'at (20/06/2025). Kegiatan ini dilakukan dalam upaya normalisasi sungai untuk menekan resiko terjadinya banjir, utamanya kawasan Tanggulangin dan Candi yang kerap menjadi langganan banjir setiap kali musim penghujan.

Dengan menyusuri sungai, menurut Bupati Subandi, paling tidak bisa mengetahui apa yang menjadi penyebab aliran sungai tidak mengalir lancar. Jika ditemukan banyak endapan lumpur bisa diselesaikan dengan pengerukan sungai serta pembersihan tanaman liar yang menjadi penyebab sungai menjadi dangkal.

“banyak aliran sungai yang mengalami pendangkalan yang disebabkan tertutup tumbuhan seperti eceng gondok dan kangkung, ini yang menyebabkan aliran sungai tidak lancar untuk itu pada kesempatan ini saya memastikan pengerjaan normalisasi akan terus dikebut”, katanya



Dengan melaksanakan sidak ini telah diketahui apa yang menjadi penyebab banjir, pendangkalan yang terjadi dilakukan pengerukan sepanjang 2,5 kilometer hingga bulan Juli mendatang ditargetkan 3,8 kilometer.

BACA JUGA [Pantau Proses Pemadaman, Jaksa Agung Pastikan Data Perkara Aman](#)

Subandi menegaskan, normalisasi difokuskan di wilayah yang selama ini menjadi langganan banjir, seperti Tanggulangin, Candi, hingga Porong. Ia juga mengatakan akan dibangun DAM di wilayah Kedungpeluk karena hal ini juga sebagai bagian dari pengendalian banjir.

“Pemenang proyek sudah ada, tinggal pelaksanaan, Kami akan terus kontrol biar sungainya bersih dan paling tidak di tahun depan tidak ada dampak banjir, jika anggaran kurang akan kami siapkan lewat PAK (Perubahan Anggaran Keuangan),” ujarnya.

Iapun menambahkan jika Pemprov Jawa Timur juga telah mengucurkan dana sebesar Rp 37 miliar, dengan harapan dengan dana yang besar ini bisa menangani masalah banjir yang selama ini melanda wilayah Sidoarjo sehingga tidak terulang di tahun-tahun mendatang.

Sementara itu Kepala DPUBMSDA Sidoarjo Dwi Eko Saptono mengatakan, sidak bupati dilakukan di aliran sungai Sidokepuh mulai dari Ngaban hingga Kedungpeluk dengan total panjang sungai mencapai enam kilometer.

“Untuk tahap awal fokus pada normalisasi sepanjang dua kilometer dari Ngaban hingga Balonggabus yang akan dikerjakan dalam dua minggu ke depan, kemudian pada Juli akan dilanjutkan pekerjaan kontraktual sepanjang 3,8 kilometer dari Balonggabus ke jembatan Kedungpeluk dan Selain melakukan pengerukan, juga dilakukan pengerjaan yang meliputi pembersihan tumbuhan liar yang menyumbat aliran air,” katanya.





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Ia juga menambahkan jika banjir yang sempat menggenangi Jalan Raya Porong lebih disebabkan oleh kontur tanah yang landai dan intensitas hujan ekstrem. seperti tercatat bahwa Curah hujan yang terjadi mencapai 114 mm yang terjadi dalam tiga jam dan itu sudah termasuk kategori ekstrem ditambah lagi lokasinya yang memang tanahnya mengalami penurunan, namun untuk ini sudah disiapkan dua pompa oleh pemerintah pusat, masing-masing di Ketapang dan Siring.

“Sungai-sungai besar di Sidoarjo merupakan kewenangan pemerintah pusat, namun pihaknya tetap melakukan pendampingan teknis, seperti pembersihan dan pengangkatan tanaman liar, seperti di wilayah Sidokepuh ini alirannya langsung ke laut, jadi kewenangannya ada di balai pusat. Tapi kami tetap bantu secara operasional karena dampaknya banjir di wilayah kami,” ucapnya

BACA JUGA [Berduka, Mantan Kepala BNPB Doni Monardo Tutup Usia](#)

Dwi Eko juga menegaskan jika kapasitas sungai di Sidoarjo saat ini masih mampu menampung curah hujan hingga 70 mm. Namun jika lebih dari itu, air akan meluber ke permukiman dan jalan raya. Untuk itu dilakukan pengendalian dari pesisir Mengare.

“Kita pastikan kapasitas sungai di kawasan padat seperti Tanggulangin dan Candi bisa optimal saat musim hujan,” pungkasnya.(ACZ)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Normalisasi Sungai Mbah Gepuk Dikebut, Bupati Subandi Tancap Gas Atasi Banjir di Titik Rawan

Getarcom
20 Juni 2025 605 Dilihat



Sidoarjo, Gema Nusantara – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memperkuat langkah strategis dalam penanganan banjir yang selama ini menjadi persoalan klasik di wilayah selatan, khususnya Tanggulangin, Candi, dan Porong. Jumat (20/6/2025), Bupati Sidoarjo H. Subandi, SH., Kn., didampingi jajaran Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA), turun langsung ke Sungai Mbah Gepuk untuk memantau percepatan program normalisasi yang kini masuk tahap krusial.

Langkah inspeksi mendadak ini dilakukan menyusul laporan rutin mengenai aliran air yang tersendat akibat pendangkalan sungai dan proliferasi tumbuhan liar. Bupati Subandi menyusuri jalur sungai dari Sidokepuh hingga Kedungpeluk guna mengidentifikasi titik-titik kritis yang menjadi biang genangan.

"Kami temukan banyak penyumbatan akibat eceng gondok dan tanaman liar lain. Pengerukan mutlak dilakukan agar fungsi hidrologis sungai kembali optimal. Proses normalisasi ini tidak bisa ditunda lagi," tegas Subandi di lokasi peninjauan.



Pemkab Sidoarjo menargetkan pengerjaan fisik normalisasi sepanjang 3,8 kilometer rampung pada akhir Juli 2025. Tahap awal pengerukan difokuskan pada 2,5 km dari wilayah Ngaban hingga Balonggabus, sebelum dilanjutkan ke arah jembatan Kedungpeluk.

"Kami prioritaskan titik-titik rawan seperti Tanggulangin dan Porong. Mereka langganan banjir tiap musim hujan. Pengerjaannya akan kami kawal secara berkala," ujar Subandi, yang juga menyebut proyek ini akan bersinergi dengan pembangunan DAM di Kedungpeluk yang akan segera dimulai pelaksanaannya.

Pemkab Sidoarjo telah menunjuk pemenang proyek DAM tersebut, dan jika ditemukan kekurangan anggaran dalam pelaksanaannya, akan segera ditutup melalui mekanisme Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2025.





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

Pemkab Sidoarjo telah menunjuk pemenang proyek DAM tersebut, dan jika ditemukan kekurangan anggaran dalam pelaksanaannya, akan segera ditutup melalui mekanisme Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2025.



Komitmen untuk menangani banjir tidak hanya datang dari pemerintah kabupaten. Pemerintah Provinsi Jawa Timur turut mengucurkan dana sebesar Rp 37 miliar, sebagai bentuk sinergi antara level daerah dan provinsi.

“Dana ini akan memperkuat intervensi teknis yang kami lakukan di titik-titik paling kritis. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan program ini,” tambah Subandi.

Kepala DPUBMSDA Sidoarjo, Dwi Eko Saptono, menjelaskan bahwa normalisasi Sungai Mbah Gepuk bukan sekadar proyek rutin, melainkan bagian dari agenda teknokratik yang menasar akar masalah banjir. Pengerjaan mencakup pengerukan, pembersihan vegetasi liar, serta pemetaan ulang kapasitas aliran.



“Secara administratif, sungai besar memang berada di bawah kewenangan pusat. Namun, kami tetap ambil bagian dalam upaya teknis seperti pendampingan operasional dan pemeliharaan saluran,” jelas Dwi Eko.

Ia menambahkan bahwa tantangan utama saat ini adalah perubahan pola hujan ekstrem. Berdasarkan data terakhir, intensitas hujan di Sidoarjo pernah mencapai 114 mm hanya dalam tiga jam jauh melebihi kapasitas aliran sungai yang rata-rata hanya sanggup menampung hingga 70 mm.

Selain pengerukan, pemerintah juga menyiapkan mitigasi lain, seperti penyediaan pompa air di kawasan rawan genangan. Dua unit pompa telah dipasang di wilayah Ketapang dan Siring. Ke depan, sistem drainase di wilayah padat penduduk seperti Tanggulangin dan Candi akan terus diperbarui agar mampu menghadapi tekanan hidrologi musiman.

Pemerintah juga tengah menyusun desain pengendalian banjir dari sisi pesisir utara, yakni wilayah Mengare, untuk mengatasi potensi limpasan dari hilir.

“Kita bicara soal sistem terpadu. Tidak bisa hanya mengandalkan pengerukan, tapi juga penguatan infrastruktur, pompanisasi, hingga intervensi ekologis jangka panjang,” pungkas Dwi Eko.

Dengan pendekatan menyeluruh mulai dari langkah responsif di lapangan hingga desain kebijakan jangka panjang, pemerintah optimistis bahwa Sidoarjo mampu mengatasi persoalan banjir secara berkelanjutan. Normalisasi Sungai Mbah Gepuk menjadi momentum penting menuju infrastruktur air yang lebih tangguh dan masyarakat yang lebih terlindungi. (Lisa)

Pemkab Sidoarjo Support Dapur Umum Mandiri Warga Terdampak Banjir Desa Ngaban

Seputar Indonesia TV
Juni 20, 2025

33 Views

Google News

Bagikan



SeputarIndonesiaTV.id

KOMINFO, Sidoarjo - Dapur umum mandiri didirikan di Balai Desa Ngaban Kecamatan Tanggulangin sejak Rabu kemarin, (18/6/2025). Ribuan nasi bergizi siap saji sudah didistribusikan kepada warga terdampak banjir di Desa Ngaban. Hari ini, Jumat, (20/6/2025), belasan relawan Tagana Dinas Sosial Sidoarjo dibantu relawan penanggulangan bencana BPBD Sidoarjo dan ibu-ibu TP-PKK Desa Ngaban masih menyiapkan ratusan nasi bungkus. Ada 900

bungkus nasi yang dimasak untuk sekali pengiriman. Pendistribusiannya dilakukan pagi dan malam. Namun kali ini pendistribusian ratusan nasi bungkus itu hanya dilakukan siang ini saja. Pasalnya saat ini beberapa wilayah Desa Ngaban yang terdampak banjir sudah surut seluruhnya.



Pagi tadi, Jumat, (20/6/2025), Wakil Bupati Sidoarjo Hj. Mimik Idayana meninjau keberadaan dapur umum mandiri tersebut. Ia apresiasi kerjasama semua pihak yang telah menyediakan bantuan makanan kepada warga Desa Ngaban terdampak banjir. Pemkab Sidoarjo akan mensupportnya. Selain menerjunkan relawannya, BPBD Sidoarjo juga menyediakan bantuan makanan tambahan gizi. Ada delapan dus makanan kemasan dalam kaleng berupa bubur kacang ijo dan koktil buah yang diberikan. Selain itu bingkisan Sembako dari Dinas Sosial Sidoarjo juga ikut diserahkan.

“Terimakasih kepada semua pihak yang telah menyediakan makanan kepada warga terdampak banjir,”ucapnya usai melihat proses masak di dapur umum.

Wabup Hj. Mimik Idayana mengatakan Kabupaten Sidoarjo merupakan kota delta. Atau wilayah yang berasal dari sedimentasi aliran sungai Brantas. Oleh sebab itu wilayahnya mudah tergenang air. Hujan sebentar saja beberapa wilayah di Sidoarjo tergenang air. Namun Pemkab Sidoarjo terus berusaha mencegahnya. Salah satunya dengan rutin menormalisasi sungai yang ada. Rencananya setiap tiga bulan sekali normalisasi sungai dilakukan.

“Alhamdulillah dibeberapa titik sudah surut, mudah-mudahan tidak banjir lagi karena Kabupaten Sidoarjo ini kota delta, hujan sedikit banjir, tapi pemerintah akan maksimal untuk mencegah banjir, kedepannya normalisasi sungai mungkin dilakukan tiga bulan sekali,”ucapnya.

Wabup Hj. Mimik Idayana juga meminta masyarakat mendukung pencegahan banjir yang dilakukan. Caranya dengan tidak membuang sampah sembarangan. Selain itu mengaktifkan kerjabakti membersihkan lingkungan. Got-got yang kotor dan tersumbat harus dapat dibersihkan. Warga juga dimintanya untuk tidak menutup saluran got yang ada didepan rumahnya. Karena itu akan mengganggu kelancaran aliran air serta menjadi Kendala saat got akan dibersihkan.





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



“Got didepan rumahnya itu dikeruk, inshaalloh itu juga akan mengatasi banjir, ayo kerjabakti, kalau masyarakatnya sering kerja bakti, inshaalloh kita terbebas banjir,”ujarnya.

Sementara itu Plt. Kalaksa BPBD Sidoarjo Sabino Mariano mengatakan saat ini hampir seluruh genangan telah surut. Tinggal Desa Candipari dan Desa Pesawahan Kecamatan Porong yang masih terdapat genangan. Namun air genangan-genangan tersebut sudah banyak berkurang.

“Debit air sudah surut semua, di Desa Candipari sama Desa Pesawahan hanya tinggal 10 sampai 15 centi genangan airnya,”ujarnya.

Ia mengatakan genangan air di beberapa wilayah Desa Ngaban sudah surut seluruhnya. Kondisi sungai Mbah Gepuk yang berada di Desa Ngaban juga surut signifikan bila dibandingkan dengan tiga hari lalu. Hampir 70 persen aliran air sungai Mbah Gepuk surut. Hal tersebut yang juga membantu penanganan penyedotan air genangan di beberapa RT di Desa Ngaban yang tergenang.

“Di Ngaban sudah surut seratus persen, selain karena pompa air yang kita tempatkan di Timur, kondisi sungai Mbah Gepuk juga surut sehingga memudahkan kita membuang genangan air meski saat air laut pasang,”ucapnya.

Editor : Sunday





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Pokir Abah Pri Anggota DPRD Sidoarjo: Direalisasi Lewat Dasar Kolam, Harapan Petani Ikan Bangkit Berdayakan Ketahanan Pangan

Sabtu, 21 Juni 2025 | 18:49 WIB



*Abah Pri Realisasikan Pokirnya di Desa Popoh, Kolam Jadi
Tumpuan Harapan Petani Ikan Tawar, Sidoarjo Siap Jadi
Sentra Benih Nasional. Foto: Istimewa*



Sidoarjo, Ruang.co.id — Di tengah kolam sederhana di Desa Popoh, Kecamatan Wonoayu, air yang tenang itu menyimpan gelisah. Bukan karena arus banjir atau badai luapan sungai, melainkan karena ketidakpastian masa depan. Namun H. Supriono Anggota Komisi B DPRD Sidoarjo, yang akrab disapa "Abah Pri" oleh konstituannya, dalam agenda resesnya memilih turun langsung ke jantung denyut ekonomi kecil budidaya ikan air tawar. Jumat siang (20/6).

Di situlah ia bertemu dengan Budiono, seorang pembudidaya ikan yang selama tujuh tahun setia menjaga kolamnya, walau berkali-kali hampir gulung tikar karena minimnya dukungan.

"Kedatangan Abah Pri di tempat kami, akan tahu apa keluh kesah dan permasalahan kami menjalankan usaha budidaya ikan dan benih ikan ini," ujar Budiono.

Bukan Cuma Mendengar, Tapi Membawa Jawaban

Supriono tak hanya mendengar, di kunjungan agenda resesnya ia mencatat, mencermati, lalu menegaskan satu komitmen, Pokok – Pokok Pikiran (Pokir) warga konstituannya, akan direalisasikan dalam bentuk tiga kolam bantuan lengkap dengan perangkatnya bagi kelompok petani ikan di Desa Popoh.

"Kalau Sidoarjo bisa jadi supplier benih ikan sendiri, kenapa harus ambil dari luar? Kita punya air, tenaga, semangat. Tinggal satu: keberpihakan," tegas Supriono di hadapan warga, Sabtu (21/6/2025).

Ia menekankan pentingnya kolaborasi, petani sebagai pelaku, pemerintah sebagai pendukung kebijakan, dan DPRD sebagai penghubung cita-cita rakyat dengan roda anggaran.

Antara Benih Ikan dan Benih Perubahan Semangat

Budiono yang kerap pasrah saat harus bersaing dengan benih dari luar daerah, kini kembali punya mimpi. Ia ingin Desa Popoh tak hanya dikenal sebagai penghasil ikan, tapi juga pencetak masa depan.

"Eman (sangat disayangkan), kalau benih dari sini nggak dipakai. Padahal iklimnya cocok, airnya stabil. Tinggal kami ini dibantu permodalannya untuk kuat berdiri," ujarnya penuh semangat.





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Pokir: Suara Rakyat, Bukan Gimik Politik

Supriono menolak pandangan sinis soal Pokir yang disebut “pemborosan anggaran”. Ia mengingatkan, Pokir adalah hasil reses, suara rakyat yang dibawa masuk ke dalam RKPD dan APBD, bukan untuk kepentingan pribadi.

“Kalau saya perjuangkan kolam untuk petani. Tapi karena saya tahu, dari kolam itulah anak-anak mereka bisa sekolah, dapur tetap mengepul, dan harga diri mereka terjaga,” kata Supriono lantang.

Pernyataan itu sekaligus menjawab sindiran Bupati Subandi yang sempat menyebut Pokir sebagai ajang “hambur uang” sebelum akhirnya meminta maaf dalam sidang paripurna.

Di Balik Air yang Tenang, Ada Getar Perjuangan

Di Desa Popoh, air kolam mungkin tetap tenang. Tapi di dasar kolam itu, lahir harapan baru. Abah Pri telah menyentuh bukan hanya tanah dan air, tapi hati rakyat yang lama tak tersapa.

Kunjungan Supriono menjadi titik balik semangat warga. Ia menegaskan langkah kecil seperti ini adalah bagian dari visi besar Presiden Prabowo Subianto soal swasembada pangan nasional.

